



KODE DAN KESANTUNAN DALAM RAPAT DINAS BERPERSPEKTIF GENDER DAN JABATAN

B. Wahyudi Joko Santoso ✉

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

InfoArtikel

Sejarah Artikel :
Diterima Mei 2013
Disetujui Juni 2013
Dipublikasikan Juli 2013

Kata kunci :
tindak tutur direktif, kode, kesantunan, jender, jabatan.

Keywords:
directive speech act, code, politeness, gender, and position.

Abstrak

Masalah yang dikaji adalah (i) bagaimana realisasi bentuk pemilihan kode dalam tindak tutur direktif (TTD) yang dilakukan oleh peserta rapat dinas, baik di tingkat fakultas maupun universitas di lingkungan Universitas Negeri Semarang (Unnes) dalam perspektif jender dan jabatan, (ii) bagaimana realisasi kesantunan TTD yang dilakukan oleh peserta rapat dinas tersebut? Metode penyediaan data berupa metode percakapan dengan teknik dasar sadap, serta teknik lanjutan teknik simak libat cakap, yakni menyimak dan berpartisipasi dalam pembicaraan sambil mencatat. Adapun metode analisis menggunakan metode padan, submetode sosiopragmatis dengan teknik ganti, sisip, dan perluas yang disampaikan secara deskriptif-analitik-interpretatif. Metode penyajian hasil analisis adalah informal. Hasil penelitian ini adalah realisasi penggunaan kode TTD, baik oleh rektor, ketua senat universitas, sekretaris senat universitas, dekan, pembantu dekan, kepala bagian, dan kepala subbagian (laki-laki dan perempuan) berupa kode Indonesia secara dominan, baik baku maupun tidak baku; dan sebagian kecil berupa campur kode (Indonesia tidak baku, Inggris, Jawa (halus dan ngoko), serta Arab. Dari sisi realisasi kesantunan berbahasa, baik pemimpin rapat maupun peserta rapat (laki-laki) cenderung menggunakan tindak tutur langsung, baik berpenanda kesantunan, seperti *tolong*, *harap*, *mari*, dan *dipersilakan* maupun tidak berpenanda dibandingkan dengan ber-TTD tidak langsung. Sebaliknya, pemimpin atau peserta rapat perempuan cenderung ber-TTD secara tidak langsung dengan modus interogatif. Arah TTD bersifat dua arah, baik dari pemimpin rapat maupun peserta rapat. Namun, kecenderungannya, arah tersebut TTD berasal dari yang memimpin rapat ke yang dipimpin (dari pejabat versus nonpejabat atau dari pejabat yang lebih tinggi ke yang lebih rendah).

Abstract

*This study aimed to investigate (i) how the realization of the electoral code in the directive speech acts (TTD) conducted by a formal meeting participants, both at the faculty and university in the State University of Semarang in genre and position perspective, (ii) how the realization of politeness TTD conducted by the formal meeting participants. The data collecting method was conversation with the basic method of "tapping techniques", advanced techniques of listening, watching, and talking in the conversation by noting. The method of data analysis was padan (matching) method. The submethod applied was sociopragmatic method with changing, inserting, expanding, and paraphrasing techniques, delivered of analytic-descriptive-interpretative writing. The method of presenting results used an informal presentation. The results of this study were: (1) the realization of TTD code, either by rector, chairman of the university senate, secretary of the university senate, dean, assistant dean, head of department, or head of subdivision officials (men and women) used Indonesian code predominantly, either formal or not formal usage, and in small groups, they used the mixed code of informal Indonesian, English, Javanese (smooth and not-smooth 'ngoko'), and Arabic; (2) the realization of linguistic politeness, both meeting leaders and meeting participants (men) tended to use direct speech act, either politeness sign, like *tolong*, *harap*, *mari*, and *dipersilakan* or not politeness sign compared to using of indirect speech act. On the contrary, the meeting leader or women participant tended to use the indirect speech act with the interrogative mode. The direction of the directive speech act was two-way direction, for both meeting leaders and participants of the meeting. However, apparently, the direction of directive speech act tended to come from the meeting leader to the participants meeting (from official(s) versus non-officials or of higher official(s) to lower one(s)).*

PENDAHULUAN

Bahasa hidup di dalam masyarakat tutur dan dipakai oleh para pemiliknya untuk menjalin kerja sama dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam rapat-rapat dinas. Kelangsungan hidup sebuah bahasa sangat dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi tutur di dalam masyarakat tutur yang bersangkutan. Pada gilirannya, nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang tersebut ikut menentukan realisasi bentuk-bentuk bahasa itu sendiri, termasuk pemilihan kode dan kesantunan dalam bertindak tutur.

Berkaitan dengan hal itu, Austin (1965) menyatakan bahwa berbahasa itu tidak hanya berkata-kata saja (*saying some thing*) melainkan juga melakukan sesuatu yang lain (*doing some thing*), yakni penutur ingin menyampaikan maksud-maksud tertentu kepada mitra tuturnya, misalnya menyuruh atau meminta orang lain melakukan sesuatu. Tindak tutur semacam itu disebut dengan tindak tutur direktif. TTD yang akan dikaji di dalam penelitian ini adalah TTD yang dipakai di dalam rapat-rapat dinas, baik di tingkat fakultas maupun universitas di lingkungan Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Tindak tutur merupakan analisis pragmatik, yaitu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa dari aspek penggunaannya. Leech (1983) menyatakan bahwa pragmatik mempelajari maksud ujaran (yaitu untuk apa ujaran itu dilakukan); menanyakan apa yang seseorang maksudkan dengan suatu tindak tutur; dan mengaitkan makna dengan siapa berbicara kepada siapa, di mana, bilamana, bagaimana, dan sebagainya. Tindak tutur merupakan entitas yang bersifat sentral di dalam pragmatik dan juga merupakan dasar bagi analisis topik-topik lain di bidang ini, seperti praanggapan, perikutan, implikatur percakapan, prinsip kerja sama, dan prinsip kesantunan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga hal pokok, yaitu pemakaian bahasa, jender, dan jabatan dalam masyarakat bahasa Unnes (*State Semarang University speech community*) yang bersifat heterogen. Keheterogenan itu tampak dari umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status sosial (jabatan), dan sebagainya sehingga dapat dihipotesiskan bahwa para penutur akan menghasilkan tuturan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, faktor-faktor sosial

kemasyaratan itu sangat berpengaruh terhadap bentuk-bentuk bahasa yang diproduksi oleh penutur.

Menurut Wardhaugh (1988), sosiolinguistik adalah ilmu interdisipliner yang mengkaji masyarakat (*society*), bahasa (*language*), dan fungsi bahasa (*functions of language*) dalam masyarakat tutur. Sementara itu, Fishman (lihat Oetomo, 1987) mengajukan pendekatan sosiolinguistik yang intinya adalah siapa berbicara (menulis) dengan bahasa apa atau variasi bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan untuk tujuan apa (*who speaks what language to whom and when*). Pragmatik adalah studi tentang makna dalam hubungannya dengan situasi tutur (Leech, 1983). Adapun studi tentang hubungan antara bahasa dengan konteksnya yang disebut dengan pragmatik (Levinson, 1983).

Sementara itu, Wijana (1996) menyatakan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana bahasa itu digunakan dalam berkomunikasi secara nyata. Menurut Leech (1983), kajian pragmatik dapat dipilah menjadi 2 bagian, yakni pragmalinguistik dan sosiopragmatik. Kajian pragmalinguistik dekat dengan tradisi Anglo-Amerika, dan kajian sosiopragmatik berurusan dengan kajian pragmatik Kontinental. Tradisi kajian pragmatik Anglo-Amerika digolongkan sebagai kajian linguistik formal, sedangkan tradisi kajian pragmatik Kontinental digolongkan sebagai kajian linguistik fungsional.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) bagaimana realisasi bentuk pemilihan kode TTD pemimpin — peserta rapat dinas, baik di tingkat fakultas maupun universitas dalam perspektif jender dan jabatan dan (2) bagaimana realisasi kesantunan TTD pemimpin — peserta rapat dinas tersebut dalam perspektif jender dan jabatan?

Berkaitan dengan variasi bahasa, paling tidak terdapat dua kubu yang tarik-menarik. Kedua kubu tersebut adalah aliran linguistik murni (baca struktural) dan aliran sosiolinguistik (baca fungsional). Menurut aliran yang pertama bahwa masyarakat bahasa itu homogen sifatnya, artinya bahasa yang dimiliki oleh setiap individu (anak-anak, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan) sama dalam segala situasi, tempat, dan sebagainya. Kubu

kedua berpendapat bahwa masyarakat bahasa itu bersifat heterogen, artinya bahasa yang dihasilkan oleh masyarakat penutur bahasa itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya menghasilkan tuturan yang berbeda-beda. Dengan demikian, yang disebut *single style speaker* itu tidak ada (sama sekali) dalam masyarakat tutur yang sebenarnya. Dalam hal ini, peneliti mengikuti aliran yang kedua (sosiolinguistik) karena secara empiris di dalam masyarakat ditemukan variasi-variasi bahasa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial—kemasyarakatan yang ada.

Semua bahasa memperlihatkan banyak variasi internal. Dengan kata lain, masing-masing bahasa memiliki sejumlah variasi. Misalnya, Hudson (dalam Wardhaugh, 1998) mendefinisikan variasi bahasa "sebagai seperangkat persoalan linguistik dengan distribusi yang mirip". Definisi ini memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa semua bahasa berikut ini adalah variasi: bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Inggris London, bahasa Inggris dari komentator sepak bola, dan sebagainya. Definisi ini juga memungkinkan kita memperlakukan semua bahasa dari beberapa penutur multibahasa atau masyarakat, sebagai bahasa tunggal, karena semua perhatian persoalan linguistik mempunyai distribusi sosial yang mirip.

Sementara itu, bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola-pola yang menyerupai pola umum bahasa induknya disebut dengan variasi bahasa. Adapun wujud variasi itu dapat berupa idiolek, dialek, ragam bahasa, register, maupun undha-usuk (Poedjosoedarmo, 1976).

Terdapat beberapa variasi bahasa. *Pertama*, idiolek, yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Idiolek ini berkenaan dengan "warna" suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dsb. *Kedua*, dialek, yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada di suatu tempat atau area tertentu. Bidang studi yang mempelajari variasi bahasa ini adalah dialektologi. *Ketiga*, kronolek, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Sebagai contoh, variasi bahasa Indonesia pada masa tahun tiga puluhan, lima puluhan, atau pun pada saat ini. *Keempat*, sosiolek atau dialek sosial, yaitu

variasi bahasa yang berkenaan dengan status, golongan dan kelas sosial para penuturnya. Dalam sosiolinguistik variasi inilah yang menyangkut semua masalah pribadi penuturnya, seperti usia, pendidikan, keadaan sosial ekonomi, pekerjaan, seks, dsb. Sehubungan dengan ragam bahasa yang berkenaan dengan tingkat, golongan, status, dan kelas sosial para penuturnya disebut dengan prokem (Poedjosoedarmo, 1976; Wijana, 1998).

Istilah kode dipakai untuk menyebut salah satu varian di dalam hierarki kebahasaan, sehingga selain kode yang mengacu kepada bahasa (seperti bahasa Inggris, Indonesia, dsb.), juga mengacu kepada variasi bahasa, seperti varian regional (bahasa Jawa dialek Banyumas, Jogja-Solo, Surabaya), juga varian kelas sosial yang disebut dengan dialek sosial (bahasa Jawa halus dan kasar), varian ragam dan gaya yang dirangkum dalam laras bahasa (gaya sopan, gaya santai, dsb.), dan varian kegunaan atau register (bahasa pidato, bahasa doa, dsb.). Kenyataan itu menunjukkan bahwa hierarki kebahasaan dimulai dari bahasa pada tataran paling atas dan disusul kode yang terdiri atas varian, ragam, gaya, dan register (lihat Suwito, 1991).

Selanjutnya, campur kode (*code-mixing*) terjadi apabila seorang penutur menggunakan satu bahasa secara dominan dan mendukung satu tuturan yang disisipi dengan unsur bahasa lainnya. Hal ini biasanya berhubungan dengan karakteristik penutur, seperti latar belakang sosial, tingkat pendidikan, rasa keagamaan, dsb. Biasanya ciri menonjolnya berupa kesantunan situasi. Namun, hal itu bisa terjadi karena keterbatasan bahasa atau ungkapan dalam bahasa tersebut tidak ada padanannya, sehingga ada keterpaksaan menggunakan kode lain, walaupun hanya mendukung satu fungsi.

Campur kode dibagi menjadi dua, yaitu (a) campur kode ke dalam, yaitu campur kode yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya dan (b) campur kode ke luar: campur kode yang berasal dari bahasa asing. Adapun Latar belakang terjadinya campur kode dapat disebabkan (a) sikap: latar belakang sikap penutur; (b) kebahasaan: latar belakang keterbatasan bahasa, sehingga ada alasan identifikasi peranan, identifikasi ragam, dan keinginan untuk menjelaskan sesuatu. Dengan demikian, campur kode terjadi karena adanya

hubungan timbal balik antara peranan penutur, bentuk bahasa, dan fungsi bahasa. Sementara itu, wujud campur kode dapat berupa penyisipan (a) kata, (b) frasa, (c) klausa, (d) ungkapan/idiom, dan (e) baster.

Konsep kesantunan dalam interaksi sosial dan percakapan menjadi topik yang sangat penting dalam kajian sosiologi dan kajian percakapan. Kesantunan, seperti diutarakan oleh Searle (1976), merupakan bentuk tindak tutur ilokusi yang bersifat tidak langsung, menjadi kajian yang paling berguna karena percakapan itu menuntut kesantunan yang normal. Hal itu tampak dalam kutipan berikut:

“in the field of indirect illocutionary act, the area of directives is the most useful to study because ordinary conversational requirements of politeness normally make it awkward to issue flat imperative statements or explicit performatives, and we therefore seek to find indirect means to our illocutionary ends. In directives, politeness is the chief motivation for indirectness.”

Menurut Muslich (2007), tata cara berbahasa sangat penting diperhatikan oleh para peserta tutur demi kelancaran komunikasi. Tata cara berbahasa dipengaruhi norma-norma budaya suku bangsa atau kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, masalah tata cara berbahasa ini harus mendapatkan perhatian, terutama dalam proses belajar mengajar bahasa. Tata cara berbahasa bertujuan mengatur serangkaian hal berikut. (1) Apa yang sebaiknya dikatakan pada waktu dan keadaan tertentu. (2) Ragam bahasa apa yang sewajarnya dipakai dalam situasi tertentu. (3) Kapan dan bagaimana giliran berbicara dan pembicaraan sela diterapkan. (4) Bagaimana mengatur kenyaringan suara ketika berbicara. (5) Bagaimana sikap dan gerak-gerik ketika berbicara dan (6) kapan harus diam dan mengakhiri pembicaraan.

Sementara itu, Leech (1983) menentukan parameter kesantunan imperatif yang dalam hal ini disebutnya dengan tuturan impositif. Pakar ini mengemukakan 3 skala kesantunan, yaitu (a) *cost-benefit scale* atau skala kerugian dan keuntungan: menunjuk kepada besar kecilnya kerugian dan keuntungan yang diakibatkan oleh sebuah tindak tutur pada sebuah pertuturan, (b)

optionality scale atau skala pilihan: menunjuk kepada banyak atau sedikitnya pilihan yang disampaikan si penutur kepada si mitra tutur di dalam kegiatan bertutur, dan (c) *indirectness scale* atau skala ketidaklangsungan: menunjuk kepada peringkat langsung atau tidak langsungnya maksud sebuah tuturan.

Lakoff (1975) menyarankan 3 strategi (prinsip) yang dapat digunakan untuk menjaga keharmonisan dalam bertutur, yakni (i) jangan memaksa mitra tutur, (ii) berikan pilihan kepada mitra tutur, dan (iii) berikan kesempatan mitra tutur untuk menyelesaikan maksudnya. Ketiga hal tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. **Jangan memaksa.** Prinsip ini merupakan prinsip kesantunan yang mendasar, formal, dan universal karena pada prinsipnya manusia tidak suka dipaksa untuk melakukan atau menuruti kemauan orang lain. **Berikan pilihan:** prinsip ini memberi peluang kepada mitra tutur untuk melakukan pilihan menerima atau menolak permintaan, memberikan kesempatan untuk berpikir dan bertindak guna meluluskan atau menolak permintaan mitra tutur. Penutur hendaknya menggunakan ujaran dalam kalimat tanya. Terakhir, **Berikan kesempatan:** mitra tutur hendaknya memberikan kesempatan dan waktu kepada mitra tutur untuk menyelesaikan maksud tuturannya.

METODE PENELITIAN

Penyediaan data primer dilakukan dengan metode “penyimak,” yakni menyimak penggunaan kesantunan berbahasa oleh peserta rapat dinas di lingkungan Unnes dengan teknik simak libat cakup karena peneliti menyimak penggunaan kesantunan berbahasa baik secara langsung (lisan) dan teknik rekam sebagai teknik lanjutannya.

Untuk menjawab kedua permasalahan yang sudah dirumuskan di atas, digunakan metode distribusional. Metode distribusional adalah metode dengan alat penentu dari bahasa yang bersangkutan dengan teknik dasar bagi unsur langsung beserta teknik-teknik lanjutannya, seperti teknik lesap dan perluas (Sudaryanto, 1993).

Metode penyajian adalah metode informal, yakni metode penyajian dengan kata-kata biasa (*natural language*) walaupun dengan terminologi yang sifatnya teknis; dan

pelaksanaan dari metode informal tersebut sekaligus merupakan teknik informal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari tulisan ini hanya dibahas 1 peristiwa tutur yang terjadi dalam rapat dinas, yakni peristiwa tutur di tingkat universitas (rektorat) mengingat terbatasnya halaman.

Konteks rapat dinas di tingkat rektorat ini adalah sebagai berikut. Konteks: Rapat dinas berlangsung pada tanggal 16 Agustus 2011 di ruang Ruang Rapat Senat Universitas. Yang hadir dalam rapat tersebut adalah Rektor (R), Ketua Senat Universitas (sebagai pemateri-1), Sekretaris Senat Universitas (pemimpin rapat), PD-2 seluruh Unnes, beberapa orang pemateri lain, dan semua doktor yang ada di Unnes. Adapun agenda rapatnya adalah usulan jabatan akademik guru besar.

Dari sisi varian jabatan dalam rapat dinas di tingkat rektorat, yakni realisasi kode TTD yang digunakan rektor (laki-laki), pemimpin rapat (laki-laki), dan nara sumber (laki-laki dan perempuan) menunjukkan perbedaan yang cukup variatif. Berikut ini TTD yang digunakan rektor dalam pengarahan rapat dinas tersebut.

- (1) *Marilah kita ucapkan syukur **alhamdulillah** kepada Allah Swt. atas kenikmatan!*
- (2) *Saya mohon maaf atas keterlambatan ini....*
- (3) *Para doktor, ini kesempatan yang baik untuk menjadi guru besar.*
- (4) *Jangan dimaknai menjadi guru besar itu **di-ngel-ngel!***
- (5) *Pada tahun 2011 ini, perpanjangan guru besar semakin sulit....*
- (6) *Silakan mem-PTUN-kan bila saya mempersulit!*
- (7) ***Goleka** perguruan tinggi yang mengumpulkan bapak-ibu, para doktor, semacam ini!*
- (8) *Kalau punya hak ya **monggo** menggunakan hak itu sesuai ketentuan yang berlaku!*
- (9) ***Sedhelok menèh** ikutlah rapat-rapat guru besar untuk melihat nilai-nilai menjadi guru besar: kejujuran. Jangankan meniplak 1 halaman, 1 kalimat pun dikategorikan plagiasi!*
- (10) *Tolong difasilitasi calon guru besar, PD-2!*

(11) *Kalau sekarang penjenengan siap silakan, dari jurusan ke fakultas, dari fakultas ke universitas. Insyah Allah universitas siap sekarang juga!*

(12) *Cobalah serahkan ke universitas, tapi mekanismenya tetap lewat jurusan; maka berbaiklah dengan jurusan karena Bapak-Ibu dibesarkan dari jurusan; berbaiklah dengan fakultas karena Bapak-Ibu difasilitasi oleh fakultas!*

(13) *Menyerah saja bila Bapak-Ibu berusia 65 tahun karena itu masa pensiun!*

(14) *Kalau mau mem-PTUN-kan silakan! Universitas siap. Kalau memang itu hak yang harus diperjuangkan secara hukum....*

Dari sisi realisasi kode, terdapat kode Indonesia baku (paling dominan) dan sedikit kode Indonesia tidak baku, misalnya (*ucapkan mengucapkan, punya mempunyai, tapi tetapi*). Kode lain berupa Arab (*alhamdulillah* dan *Insyah Allah*), maupun Jawa halus (*penjenengan* dan *monggo*) dan Jawa ngoko (*sedhélok menèh, di-ngèl-ngèl*). Dengan demikian, rektor Unnes ini menggunakan campur kode ke dalam yang berupa kode Indonesia tidak baku dan kode Jawa (halus dan ngoko) yang semuanya berwujud kata dan campur kode keluar (Arab) yang berwujud frasa (*alhamdulillah*) dan klausa (*Insyah Allah*).

Adapun dilihat dari realisasi TTD-nya dapat dipilah menjadi 2, yakni TTD yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. TTD langsung yang muncul pun sangat bervariasi, seperti TTD ajakan sebanyak 1 kali (1) *Marilah* kita ucapkan syukur *Alhamdulillah* kepada Allah Swt. atas kenikmatan), TTD larangan sebanyak 1 kali (4) *Jangan dimaknai menjadi guru besar itu **di-ngèl-ngèl!***, TTD persilahan 4 kali (6) *Silakan* mem-PTUN-kan bila saya mempersulit; (8) *Kalau punya hak ya **monggo** menggunakan hak itu sesuai ketentuan yang berlaku*; (11) *Kalau sekarang penjenengan siap silakan, dari jurusan ke fakultas, dari fakultas ke universitas*; dan (14) *Kalau mau mem-PTUN-kan silakan! Universitas siap.*, dan TTD perintah 5 kali (7) *Goleka* perguruan tinggi yang mengumpulkan bapak-ibu, para doktor semacam ini; (9) ***Sedhélok menèh** ikutlah rapat-rapat guru besar untuk*

melihat nilai-nilai menjadi guru besar: kejujuran; (10) tolong difasilitasi calon guru besar, PD-2; (12) Cobalah serahkan ke universitas, tapi mekanismenya tetap lewat jurusan, maka berbaiklah dengan jurusan karena Bapak-Ibu dibesarkan dari jurusan, berbaiklah dengan fakultas karena Bapak-Ibu difasilitasi oleh fakultas; dan (13) Menyerah saja bila Bapak-Ibu berusia 65 tahun karena itu masa pensiun).

Adapun realisasi TTD tidak langsung muncul 3 kali, yakni dalam tuturan (2) *Saya mohon maaf atas keterlambatan ini* (maksud Rektor dalam konteks tersebut adalah bahwa dia meminta supaya para pemimpin rapat dan peserta rapat mau memberikan maaf atas keterlambatannya); (3) *Para doktor, ini kesempatan yang baik untuk menjadi guru besar* (maksud Rektor dalam konteks tersebut adalah "Cepat-cepatlah menjadi guru besar!").(5) *Pada tahun 2011 ini, perpanjangan guru besar semakin sulit* (maksudnya Rektor dalam konteks tersebut adalah "Sikapilah/persiapkanlah dengan baik berkenaan dengan perpanjangan guru besar yang semakin sulit".) Ketiga tuturan tersebut bermaksud memerintah, namun disampaikan dengan kalimat deklaratif.

Alasan Rektor banyak melakukan TTD setidaknya dapat dilihat secara vertikal dan horisontal. Secara vertikal, seorang rektor adalah pemimpin tertinggi di PT, maka dia memiliki otoritas tertinggi untuk mengatur dan mengendalikan "apa pun" dan "siapa pun," khususnya kebijakan-kebijakan strategis di Unnes. Secara horisontal, dia adalah seorang dosen juga, sama dengan para doktor yang juga dosen. Dalam kapasitas ini, perintah, nasihat, ajakan, dan larangannya dapat dimaknai sebagai "pitutur" dari seorang dosen senior yang kebetulan menjabat rektor untuk memotivasi teman-teman sejawatnya supaya para doktor di Unnes "segera" mengajukan guru besar. Jadi, secara kelembagaan dan sosial-personal, apa yang dilakukan rektor, dalam hal ini senat universitas dan Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum patut diapresiasi.

Dilihat dari kesantunan TTD yang disampaikan rektor, kebanyakan tuturan yang disampaikan santun. Salah satu indikator kesantunan tuturan, menurut Leech (1983) adalah semakin tidak langsung sebuah tuturan, maka semakin santunlah tuturan tersebut dan sebaliknya. Jadi, tuturan-tuturan (1) *Marilah kita ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah*

Swt. atas kenikmatan; (2) Saya mohon maaf atas keterlambatan ini ...; (3) Paradoktor, ini kesempatan yang baik untuk menjadi guru besar; dan (5) Pada tahun 2011 ini, perpanjangan guru besar semakin sulit tergolong TTD yang santun.

Di samping itu, Rektor juga menggunakan TTD langsung dengan penanda kesantunan *silakan, monggo, partikel -lah, dan tolong*, seperti tampak dalam tuturan-tuturan berikut ini. (6) **Silakan** mem-PTUN-kan bila saya mempersulit! (8) Kalau punya hak ya **monggo** menggunakan hak itu sesuai ketentuan yang berlaku! (9) Sedhelok menèh **ikutlah** rapat-rapat guru besar untuk melihat nilai-nilai menjadi guru besar: kejujuran. Jangankan menjiplak 1 halaman, 1 kalimat pun dikategorikan plagiasi! (10) **Tolong** difasilitasi calon guru besar, PD-2! (11) Kalau sekarang penjenengan siap **silakan**, dari jurusan ke fakultas, dari fakultas ke universitas. Insyah Allah universitas siap sekarang juga! (12) **Cobalah** serahkan ke universitas, tapi mekanismenya tetap lewat jurusan; maka berbaiklah dengan jurusan karena Bapak-Ibu dibesarkan dari jurusan; berbaiklah dengan fakultas karena Bapak-Ibu difasilitasi oleh fakultas! Dan (14) Kalau mau mem-PTUN-kan **silakan!** Universitas siap. Kalau memang itu hak yang harus diperjuangkan secara hukum....

Dengan penggunaan teknik lesap, yakni melesapkan penanda-penanda kesantunan tersebut menjadikan tuturan-tuturan (6), (8), (9) s.d. (12), dan (14) menjadi kurang atau tidak santun. (6) **PTUN-kan** bila saya mempersulit! (8) Kalau punya hak, **gunakan** hak itu sesuai ketentuan yang berlaku! (9) Sedhelok menèh **ikut** rapat-rapat guru besar untuk melihat nilai-nilai menjadi guru besar: kejujuran. Jangankan menjiplak 1 halaman, 1 kalimat pun dikategorikan plagiasi! (10) **Difasilitasi** calon guru besar, PD-2! (11) Kalau sekarang penjenengan siap, dari jurusan ke fakultas, dari fakultas ke universitas, Insyah Allah universitas siap sekarang juga! (12) **Serahkan** ke universitas, tapi mekanismenya tetap lewat jurusan; maka **berbaik** dengan jurusan karena Bapak-Ibu dibesarkan dari jurusan; **berbaik** dengan fakultas karena Bapak-Ibu difasilitasi oleh fakultas! Dan (14) Kalau mau mem-PTUN-kan, Universitas siap. Kalau memang itu hak yang harus diperjuangkan secara hukum....

Adapun tuturan (7) *Goleka* perguruan tinggi yang mengumpulkan bapak-ibu, para

doktor semacam ini! dan (14) *Menyerah saja bila Bapak-Ibu berusia 65 tahun karena itu masa pensiun!* termasuk tuturan yang tergolong kurang santun karena memerintah orang lain disampaikan secara langsung, yakni memerintah dinyatakan dengan kalimat perintah, apalagi tanpa penanda kesantunan, seperti *silakan, tolong, maaf, partikel -lah*, dsb. TTD semacam itu oleh Leech dikategorikan kurang santun. Untuk mempersantun TTD tersebut, teknik perluas, sisipdan ganti dapat digunakan, misalnya tuturan (7) menjadi *Manggo panjenengan pados perguruan tinggi yang mengumpulkan bapak-ibu, para doktor semacam ini!* dan (14) menjadi *Menurut saya, sebaiknya Bapak-Ibu istirahat saja bila Bapak-Ibu berusia 65 tahun belum guru besar karena itu masa pensiun! Betul apa tidak?*

Selanjutnya, perhatikanlah TTD (15) s.d. (20) yang dilakukan oleh pemimpin rapat dinas di tingkat rektorat ini (laki-laki).

(15) *Bapak-Ibu mohon sabar. ...*
(Selanjutnya Rektor datang...).

(16) *Marilah kita awali dengan ucapan Basmallah supaya kegiatan ini barokhah dan bermanfaat.*

(17) *Bila Bapak Rektor masih memiliki agenda lain kami persilakan meninggalkan ruangan! Terima kasih....*

(18) *Masing-masing penyaji dipersilakan menyampaikan materi dengan waktu maksimal 15 menit!*

(19) *Prof. Wiyono, kami persilakan memaparkan materi dengan waktu yang sama, yakni maksimal 15 menit!*

(20) *Setelah paparan Prof. Slamet selesai Bapak-Ibu kami berikan kesempatan untuk bertanya....*

Dari realisasi kode, pemimpin rapat tersebut menggunakan 3 kode sekaligus, yaitu kode formal secara dominan, kode tidak formal (*Prof Profesor*), dan kode Arab (*basmallah, barokah*). Dengan kata lain, pemimpin rapat ini pun juga melakukan campur kode ke dalam yang berupa kata dan campur kode keluar yang berupa klausa (*basmallah*). Adapun penggunaan kode formal dipandang sudah tepat mengingat ini forum rapat dinas.

Dilihat dari realisasi TTD-nya, hal itu

dapat dipilah menjadi 2, yakni TTD yang disampaikan secara langsung dan tidak langsung. TTD langsung yang muncul pun bervariasi, seperti TTD **permohonan** sebanyak 1 kali (15) *Bapak-Ibu mohon sabar!*), TTD **ajakan** sebanyak 1 kali (16) *Marilah kita awali dengan ucapan Basmallah supaya kegiatan ini barokhah dan bermanfaat!*), dan TTD **persilahan** sebanyak 3 kali (17) *Bila Bapak Rektor masih memiliki agenda lain kami persilakan meninggalkan ruangan!* (18) *Masing-masing penyaji dipersilakan menyampaikan materi dengan waktu maksimal 15 menit!*; dan (19) *Prof. Wiyono, kami persilakan memaparkan materi dengan waktu yang sama, yakni maksimal 15 menit!*).

Adapun TTD tidak langsung hanya muncul 1 kali, yakni pada tuturan (20) *setelah paparan Prof. Slamet selesai Bapak-Ibu kami berikan kesempatan untuk bertanya*. Maksud pemimpin rapat dalam konteks tersebut adalah meminta para peserta rapat untuk bertanya setelah paparan terakhir dari nara sumber selesai. Maksud memerintah disampaikan dengan kalimat deklaratif. Alasan melakukan TTD adalah selaku pemimpin rapat, ia berkewajiban “mengatur” segala sesuatu supaya rapat tersebut dapat berjalan dengan baik.

Dilihat dari kesantunannya, ke-6 tuturan, yakni tuturan (15) s.d. (20) tergolong santun karena ke-5 TTD itu, yakni tuturan (15) merupakan TTD **permohonan**, tuturan (16) merupakan TTD **ajakan** (berpenanda kesantunan partikel *-lah* pada *Marilah*)), dan tuturan (17) s.d (19) merupakan TTD **persilaan** (berpenanda kesantunan *kami persilakan*). Adapun tuturan (20) merupakan TTD tidak langsung karena maksud memerintah diungkapkan dengan kalimat deklaratif. Mengapa ke-6 TTD yang digunakan pemimpin rapat tersebut tergolong santun semua? Hal itu dikarenakan yang bersangkutan, dari segi usia, ia relatif lebih muda dibandingkan kebanyakan peserta rapat dinas lainnya. Sebenarnya, dari segi jabatan ia lebih tinggi dari kebanyakan peserta rapat karena ia sekretaris senat universitas dan sekaligus PD-1 (FE).

Selanjutnya itu, TTD yang digunakan oleh nara sumber-1 sebanyak 3 kali dan ketiga tuturan tersebut dapat dicermati pada tutura (21) s.d. (23) di bawah ini.

(21) *Mari bersama-sama bertekat*

jangan sampai usulan guru besar dikembalikan.

(22) *Mudah-mudahan tidak ada salah paham di antara kita.*

(23) *Mudah-mudahan ada pemahaman bersama.*

Tuturan (21) *Mari bersama-sama bertekad jangan sampai usulan guru besar dikembalikan* merupakan TTD ajakan dengan penanda *mari* yang disampaikan secara langsung dan 2 TTD yang disampaikan secara tidak langsung, yakni pada tuturan (22) *Mudah-mudahan tidak ada salah paham di antara kita* (maksud penutur adalah meminta kepada peserta rapat supaya tidak ada kesalahpahaman berkenaan dengan apa yang ingin disampaikan) dan (24) *Mudah-mudahan ada pemahaman bersama* (maksud penutur adalah meminta kepada peserta rapat supaya ada pemahaman bersama berkenaan dengan apa yang ingin disampaikan).

Dari ketiga TTD tersebut tampak bahwa ia menggunakan kode Indonesia formal dan itu sudah tepat karena rapat dinas merupakan forum resmi. Adapun dari sisi kesantunannya, ketiga TTD itu juga termasuk santun karena penutur memerintah mitra tutur yang diungkapkan secara tidak langsung, baik dengan *ajakan* (21) dan dengan *harapan* (22) dan (23). Dengan demikian, nara sumber ini tidak melakukan campur kode.

Adapun TTD dari nara sumber perempuan dapat dilihat pada tuturan (24) berikut.

(24) ... *Yang mencari reviewer eksternal Bapak-Ibu sendiri dengan membawa surat pengantar dari Rektor....*

TTD (24) di atas disampaikan secara tidak langsung karena maksud memerintah disampaikan dengan kalimat deklaratif. Dalam konteks tersebut, dia bermaksud bahwa para calon guru besar (dokter dan Ph.D.) dipersilakan (dihimbau) mencari *reviewer* ('penilai') eksternal sendiri dengan membawa surat pengantar dari Rektor supaya hal itu tidak menyalahi aturan atau prosedur yang ada. Kode yang digunakan ada 2, yakni kode Indonesia formal (kode dominan) dan 1 kode Inggris, yakni *reviewer*. Dengan kata lain, nara sumber ini melakukan campur kode keluar. Adapun bila

dilihat dari kesantunannya, TTD tersebut tergolong santun karena maksud memerintah disampaikan dengan kalimat deklaratif, bukan dengan kalimat perintah.

PENUTUP

Secara umum, realisasi penggunaan kode TTD, baik oleh rektor, ketua senat universitas, sekretaris senat universitas, dekan, pembantu dekan, kepala bagian, dan kepala subbagian (laki-laki dan perempuan) berupa kode Indonesia, baik baku maupun tidak baku; dan sebagian kecil berupa campur kode (Indonesia tidak baku, Inggris, Jawa (halus dan ngoko), dan juga Arab. Dengan demikian, para pemimpin dan peserta rapat dinas cenderung melakukan campur kode keluar dan kedalam. Hal semacam itu, tidak dapat dihindari karena Unnes merupakan *speech community* multilingual dan diglosik.

Adapun dari sisi realisasi kesantunan berbahasa, baik pemimpin rapat maupun peserta rapat (laki-laki) dalam ber-TTD cenderung menggunakan tindak tutur langsung, baik berpenanda kesantunan (*tolong, harap, mari, silakan*, dan penggunaan partikel *-lah*) maupun tidak berpenanda kesantunan (dibandingkan ber-TTD tidak langsung). Sebaliknya, pemimpin atau peserta rapat perempuan cenderung ber-TTD secara tidak langsung dengan modus interogatif. TTD langsung merupakan manifestasi pelanggaran prinsip kesantunan, submaksim kebijaksanaan dan sebaliknya, TTD tidak langsung merupakan manifestasi pematuhan prinsip kesantunan, submaksim kebijaksanaan.

Akhirnya, dari simpulan itu dapat diketahui bahwa kecenderungan arah TTD berasal dari pemimpin rapat kepada yang dipimpin. Dengan demikian, di sini terdapat semacam praktik hegemoni kekuasaan, artinya yang memimpin lebih banyak memerintah, mengatur, bahkan "menekan" yang dipimpin, yang biasanya berada dalam posisi subordinatif kekuasaan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J.L. 1968. *How to Do Things with Words*. United States of America: Harvard University Press.
- Hymes, Dell. 1985. *Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*. 7th Edition. Philadelphia.

- University of Pennsylvania Press.
- Lakoff, R.T. 1975. *Language and Women's Place*. NY: Harper Colophom.
- Leech, G.N. 1983. *Principles of Pragmatiks*. New York: Longman.
- Levinson. Stephen C., 1983. *Pragmatics*. London: Cambridge University Press.
- Muslich, Masnur. 2006. "Kesantunan Berbahasa: sebuah Kajian Sociolinguistik:" Malang: Universitas Malang.
- Oetomo, Dede. 1987. "Linguistik dan Sociolinguistik: Dua Ancangan terhadap Pengkajian Bahasa Manusia" dalam *Linguistik: Teori dan Terapan*. Soenjono Dardjowidjojo (ed.). Jakarta: Lembaga Bahasa Universitas Katolik Atma Jaya.
- Poedjosoedarmo, Soepomo. 1976. "Analisa Variasi Bahasa" dalam *Penataran Dialektologi*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jakarta.
- Searle, John R. 1976. "A Classification of Illocutionary Acts" dalam *Language in Society 5*. Great Britain: University of California. Hlm.1.
- Sudaryanto. 1990. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Suwito. 1991. *Sociolinguistik*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta.
- Wardhaugh, Ronald. *An Introduction to Sociolinguistics*. 3rd Edition. Cambridge: Black Well.1998.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi.